



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 April 2021 sampai 30 Juni 2021

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,96 / 98,93%

Jumlah	5786 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 3703	
	PEREMPUAN : 2083	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 43	
	SD : 4	Diploma 3 : 217
	SMP : 21	S1 : 3021
	SMU : 674	S2 : 1703
	Diploma 1 : 22	S3 : 81
Pekerjaan	PNS : 5038	SWASTA : 85
	TNI : 12	WIRUSAHA : 21
	POLRI : 14	TENAGA KONTRAK : 217
	LAINNYA : 399	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|--|-------|
| 1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Ditjen Badilum? (Perbuatan Curang) | 3,926 |
| 2. Apakah anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah) | 3,941 |
| 3. Apakah pemberian layanan dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) | 3,959 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Untuk memperbaiki indikasi **perbuatan curang** direkomendasikan :

Masing-masing Pejabat Eselon II dan III untuk lebih aktif mengawasi dan melakukan supervisi internal terhadap pelayanan yang telah diberikan.

2. Untuk memperbaiki indikasi **hadiah** direkomendasikan :

Mensosialisasikan ke dalam dan keluar Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun.

3. Untuk memperbaiki indikasi **manipulasi peraturan** direkomendasikan :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum agar membuat petunjuk teknis Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraaran di Lingkungan Peradilan Umum, serta mempublikasikannya di website dan media elektronik lainnya.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Jakarta, 1 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM,



PRIMI HARYADI